

**ANALISIS MINAT MASYARAKAT DALAM KEIKUTSERTAAN  
BPJS KESEHATAN DI KECAMATAN GABUS  
KABUPATEN GROBOGAN**

**ANALYSIS OF COMMUNITY INTEREST IN PARTICIPATION IN  
HEALTH BPJS IN GABUS DISTRICT GROBOGAN REGENCY**

Wahyu Dewi Hapsari<sup>1\*</sup>, Kiki Natassia<sup>2</sup>, Wahyu Riniasih<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> STIKES An-Nur Purwodadi

<sup>1\*</sup>[hapsari85ku@gmail.com](mailto:hapsari85ku@gmail.com), <sup>2</sup>[kikinatassia@gmail.com](mailto:kikinatassia@gmail.com), <sup>3</sup>[wahyuannur83@gmail.com](mailto:wahyuannur83@gmail.com)

\*penulis korespondensi

**Abstrak**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Salah satu sasaran pokok BPJS Kesehatan adalah tercapainya kepesertaan semesta sesuai peta jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2019. Tetapi tampaknya hal tersebut belum dapat tercapai, karena di daerah seperti Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah pada bulan Desember tahun 2018 tercatat ada 502.879 dari 1.455.032 penduduknya belum menjadi peserta. Hal ini tentunya menjadi tanda tanya mengenai minat masyarakat dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan. Metode penelitian ini adalah survei analitik, dengan pendekatan waktu cross sectional yang pengumpulan datanya didapatkan melalui wawancara langsung menggunakan kuesioner terstruktur pada 100 responden di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan dengan teknik *purposive sampling*. Karakteristik dari 100 responden di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan 49% berumur dewasa akhir (36 – 45 tahun), 52% berpendidikan terakhir Sekolah Dasar dan 60% bekerja sebagai Petani. Sedangkan tingkat pengetahuan dari 100 responden 81% tergolong baik, 75% menganggap biaya memberatkan, 78% menganggap prosedur pendaftaran mudah, dan 70% cenderung berminat. Hasil uji statistik pada pengetahuan, biaya dan prosedur pendaftaran berpengaruh dengan minat ( $p = 0,000$ ). Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan, biaya, prosedur pendaftaran dengan minat masyarakat dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan.

**Kata kunci: BPJS Kesehatan, Pengetahuan, Biaya, Prosedur Pendaftaran, Minat.**

**Abstract**

The Social Security Organizing Agency (BPJS) Health is a public body that organizes health insurance programs. One of the main targets of BPJS Health is the achievement of universal membership according to the road map to National Health Insurance in 2019. But it seems that this has not been achieved, because in regions such as Grobogan Regency, Central Java Province in December 2018 there were 502,879 out of 1,455,032 inhabitants not yet a participant. This is certainly a question mark about the community's interest in BPJS Health participation. This research method is an analytic survey, with a cross sectional time approach where the data collection is obtained through direct interviews using a structured questionnaire to 100 respondents in Gabus District Grobogan Regency with a *purposive sampling* technique. Characteristics of 100 respondents in Gabus Subdistrict, Grobogan District, 49% were in late adulthood (36 - 45 years), 52% had an elementary school education and 60% worked as farmers. While the knowledge level of 100 respondents 81% is classified as good, 75% considers burdensome costs, 78% considers registration procedures easy, and 70% tends to be interested. Statistical test results on knowledge, costs and registration procedures have an effect on interest ( $p = 0,000$ ). There is a significant

influence between knowledge, costs, registration procedures and community interest in BPJS Health participation in Gabus District, Grobogan Regency.

**Keywords: Health BPJS, Knowledge, Costs, Registration Procedures, Interests**

## 1. PENDAHULUAN

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan memiliki 3 sasaran pokok, salah satunya adalah tercapainya kepesertaan semesta sesuai peta jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2019. Akan tetapi hal tersebut tampaknya belum dapat tercapai, dikarenakan di beberapa daerah seperti di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah menurut data BPJS Kesehatan Kabupaten Grobogan pada bulan Desember tahun 2018 tercatat ada 502.879 dari 1.455.032 penduduk yang belum menjadi peserta. Hal ini tentunya menjadi tanda tanya mengenai minat masyarakat dalam keikutsertaan BPJS Kesehatannya. [1], [3]

Minat merupakan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu yang timbul karena kebutuhan yang dirasa atau tidak dirasakan atau keinginan hal tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat dalam pelayanan kesehatan, diantaranya adalah pengetahuan, biaya, dan prosedur pendaftaran. Tiga faktor tersebut sering dikaitkan oleh peneliti lain dengan minat masyarakat dalam keikutsertaan program peayanan kesehatan. [7], [10]

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Melinda, Anneke Suparwati, Antono Suryoputro pada tahun 2016 mengenai Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Minat Masyarakat Dalam Keikutsertaan BPJS Mandiri Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo mengungkapkan bahwa pengetahuan, situasi ekonomian, kontrol perilaku tidak ada hubungan yang signifikan dengan minat dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan Mandiri. Sedangkan sikap, persepsi, dukungan orang terdekat ada hubungan yang signifikan dengan minat dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan Mandiri. [6]

Berdasarkan data BPJS Kesehatan Kabupaten Grobogan pada bulan Desember tahun 2018 tercatat ada 33.514 penduduknya belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. Dilihat dari masih banyaknya orang yang belum menjadi peserta tampaknya minat masyarakat tampak masih rendah. [2], [3].

Studi pendahuluan dilakukan dengan mewawancarai penduduk Kecamatan Gabus yang belum memiliki BPJS Kesehatan Mandiri,. Dari hasil wawancara tersebut diketahui 4 warga belum mengerti definisi dan manfaat BPJS Kesehatan, 8 warga merasa malas karena prosedur pendaftarannya yang di anggap lama dan harus pergi ke kota. Rasa malas tersebut dikarenakan prosedur pendaftaran BPJS Kesehatan dirasa rumit, sehingga mengurangi minat menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri. Selain itu terdapat 6 warga yang mengatakan takut apabila setiap bulan tidak bisa membayar iuran karena pekerjaannya sebagai petani yang terkadang penghasilannya tidak menentu.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Minat Masyarakat Dalam Keikutsertaan BPJS Kesehatan Di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan.

## 2. DASAR TEORI /MATERIAL DAN METODOLOGI/PERANCANGAN

### A. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan sebuah badan hukum publik untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial yang dibentuk pada tanggal 1 Januari Tahun 2014. Sebagai penyelenggara Jaminan Sosial melalui program-programnya BPJS Kesehatan memberikan sebuah Jaminan Kesehatan terhadap kepesertaan dalam BPJS dengan harapan semua masyarakat Indonesia dapat mendapatkan hak-hak kesehatannya agar dapat hidup secara layak dan produktif [1].

Tiga sasaran pokok BPJS Kesehatan, yaitu

1. Tercapainya kepesertaan semesta sesuai peta jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2019.
2. Tercapainya jaminan pemeliharaan kesehatan yang optimal dan berkesinambungan.
3. Terciptanya kelembagaan BPJS Kesehatan yang handal, unggul, dan terpercaya.

Manfaat yang menjadi hak peserta BPJS kesehatan antara lain :

1. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.

Pelayanan kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesifik (primer) meliputi: pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang diberikan oleh Puskesmas atau yang setara, Praktik Mandiri Dokter, Praktik Mandiri Dokter Gigi, Klinik pertama atau yang setara termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama milik TNI/ Polri, Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara dan Fasilitas Kesehatan Penunjang (Apotik dan Laboratorium).

2. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan.

Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialis atau sub spesialis yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus yang diberikan oleh Klinik utama atau yang setara, Rumah Sakit Umum baik milik Pemerintah maupun Swasta, Rumah Sakit Khusus, Fasilitas Kesehatan Penunjang (Apotik, Optik dan Laboratorium).

Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia dan telah membayar iuran, yang dibagi atas jenis kepesertaan sebagai berikut:

1. Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK), merupakan program Jaminan Kesehatan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD.
2. Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) terdiri dari:
  - a. Pekerja Penerima Upah (PPU)

PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah, yang terdiri dari PPU Penyelenggara Negara dan PPU Non Penyelenggara.

- 1) PPU penyelenggara Negara terdiri Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat/Daerah, PNS yang dipekerjakan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Tentara Nasional Indonesia (TNI)/PNS TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)/ PNS POLRI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
- 2) PPU Non Penyelenggara Negara terdiri dari BUMN, dan Swasta.

b. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBU)

PBBU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, yang terdiri dari: Notaris/Pengacara/LSM, Dokter/Bidan Praktek Swasta, Pedangang/ Penyedia Jasa, Petani/Peternak, Nelayan, Supir, Ojek, Montir dan pekerja lain yang mampu membayar iuran.

c. Bukan Pekerja (BP)

BP adalah setiap orang yang bukan termasuk masyarakat yang didaftarkan dan iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat/Daerah, PPU serta PBBU, yang terdiri dari:

1) BP Penyelenggara Negara terdiri dari: Penerima Pensiun (PP) Pejabat Negara, PP PNS Pusat/Daerah, PP TNI, PP POLRI, Veteran dan Perintis Kemerdekaan.

2) BP Non Penyelenggara Negara terdiri dari Investor, Pemberi Kerja dan BP lain yang mampu membayar iuran.

Hak peserta BPJS Kesehatan meliputi:

1. Mendapatkan kartu identitas sebagai identitas peserta JKN-KIS untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan.
4. Menyampaikan pengaduan, kritik dan saran secara lisan maupun tertulis kepada BPJS Kesehatan.

Kewajiban peserta BPJS Kesehatan meliputi:

1. Mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai peserta JKN-KIS Kepada BPJS Kesehatan.
2. Membayar iuran secara rutin setiap bulan sebelum tanggal 10 (sepuluh).
3. Memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
4. Melaporkan perubahan data dirinya dan anggota keluarganya, antara lain perubahan golongan, pangkat atau besaran gaji, pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat

Iuran peserta jaminan kesehatan ialah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur setiap bulannya oleh peserta, pemberi kerja dan atau Pemerintah untuk program jaminan kesehatan.

Ada beberapa besaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dan pihak yang membayar antara lain:

1. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)  
Peserta PBI merupakan peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah sebesar Rp. 23.000/ orang/ bulan.
2. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBU)  
Iuran PBBU dibayar oleh orang yang bersangkutan atau pihak lain atas nama peserta sebesar Rp. 80.000,-/ orang/ bulan (Kelas I), Rp. 51.000,-/ orang /bulan (Kelas II) dan Rp. 25.500,- (Kelas III).
3. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)  
Iuran PPU dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja dengan rindian sebagai berikut:
  - a. PPU Penyelenggara Negara.
    - 1) Pemberi kerja : 3%
    - 2) Pekerja atau pensiunan : 2%
  - b. PPU Non Penyelenggara Negara.
    - 1) Pemberi kerja : 4%

2) Pekerja atau pensiunan : 1%

Peserta pekerja bukan penerima upah dan Peserta bukan pekerja wajib membayar lunas iuran jaminan kesehatan seluruh peserta yang menjadi tanggung jawabnya pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulan kepada BPJS Kesehatan. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

Keterlambatan pembayaran lunas jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud, dikenakan denda administratif 2% (dua persen) perbulan dari total iuran yang tertunggak dan ditanggung pemberi kerja. Dalam hal keterlambatan lunas iuran jaminan kesehatan disebabkan karena kesalahan pemberi kerja, maka pemberi kerja wajib membayar pelayanan kesehatan pekerjanya sebelum dilakukan pelunasan pembayaran iuran oleh pemberi kerja.

Pembayaran iuran bagi peserta dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Peserta dan calon peserta PBPJ Kelas I dan II wajib menggunakan fasilitas pembayaran *auto debit* (rekening maupun kartu kredit).
2. Peserta memasukkan nomor kartu peserta pada kanal pembayaran yang tersedia, seperti:
  - a. Kanal pembayaran bank : kantor bank dan e-channel (ATM, *Internet Banking*, *SMS Banking*, *Mobile Banking*).
  - b. Kanal pembayaran non bank: outlet PPOB (*Payment Point Online Banking*) modern atau tradisional.

Prosedur pendaftaran BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Melakukan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi peserta PBI yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan di bidang statistik yang diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial. Peserta PBI juga ditetapkan oleh Pemerintah Pusat juga peserta yang sudah didaftarkan oleh Pemerintah Daerah setempat yang mengintegrasikan program Jamkesmas ke program JKN.
2. Pendaftaran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah
  - a. Perusahaan mendaftarkan seluruh karyawan dan anggota keluarganya dengan melampirkan formulir registrasi badan usaha atau badan hukum lainnya dan data migrasi karyawan beserta anggota keluarganya sesuai dengan yang sudah ditentukan.
  - b. Perusahaan menerima nomor *Virtual Account* untuk dilakukannya pembayaran.
  - c. Bukti pembayaran diserahkan kepada pihak BPJS Kesehatan untuk mencetak kartu JKN
3. Pendaftaran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah
  - a. Peserta mendaftar secara perorangan pada kantor BPJS Kesehatan.
  - b. Seluruh anggota keluarga didaftarkan sebagai anggota BPJS Kesehatan.
  - c. Peserta mengisi formulir pendaftaran dengan mengisi foto copy Kartu Keluarga, foto copy KTP, foto copy buku tabungan peserta yang ada dalam Kartu Keluarga dan melampirkan foto dengan ukuran 3cm x 4cm
  - d. Setelah mendaftar peserta mendapatkan nomor *Virtual Account*
  - e. Peserta membayar iuran dan memberikan bukti pembayaran untuk diserahkan ke BPJS Kesehatan untuk dicetak kartu JKN.[1]

## B. Teori Minat

Minat merupakan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu yang timbul karena kebutuhan, yang dirasa atau tidak dirasakan atau keinginan hal tertentu. [10]

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Dalam Pelayanan Kesehatan antara lain:

1. Faktor-faktor predisposisi (*predisposing factor*)

Faktor ini bertujuan untuk menggambarkan fakta bahwa tiap individu mempunyai kecenderungan untuk menggunakan pelayanan kesehatan yang berbeda-beda, hal ini disebabkan karena adanya ciri-ciri, yang digolongkan kedalam 3 kelompok :

- a. Ciri-ciri demografi, seperti jenis kelamin dan umur
- b. Struktur sosial, seperti status pendidikan, pekerjaan, kesukaan atau ras dan sebagainya.
- c. Manfaat-manfaat kesehatan, seperti keyakinan bahwa pelayanan kesehatan dapat menolong proses penyembuhan penyakit.

2. Faktor-faktor pendukung (*enabling factor*)

*Enabling factor* sebagai faktor pemungkin yaitu faktor yang mungkin orang sakit memanfaatkan pelayanan kesehatan. Faktor-faktor ini mencakup status ekonomi keluarga, akses jarak tempuh, sarana pelayanan kesehatan yang ada, prosedur pendaftaran dan penanggungan biaya.

3. Faktor-faktor pendorong (*reinforcing factor*)

Faktor yang memungkinkan untuk mencari pengobatan dapat terwujud di dalam tindakan apabila dirasakan sebagai kebutuhan dasar dan stimulus langsung untuk menggunakan pelayanan kesehatan. Sikap, perilaku petugas kesehatan, tokoh agama serta tokoh masyarakat. [7]

Metode penelitian ini adalah survei yang bersifat analitik, yang menggunakan pendekatan waktu cross sectional dengan metode pengumpulan data melalui wawancara langsung menggunakan kuesioner terstruktur pada 100 responden Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan yang didapat dengan cara *non random sampling* dengan teknik *purposive sampling* dari populasi sejumlah 33.514 orang penduduk yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. [5], [8]

Penelitian ini mengubah data hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan. Data dalam penelitian ini merupakan data kategorik sehingga tidak dilakukan uji normalitas data karena bisa dipastikan data secara tidak langsung berdistribusi tidak normal. Dalam penelitian ini analisis univariat digunakan untuk menganalisis variabel-variabel secara deskriptif untuk mengetahui karakteristik subyek penelitian, mulai dari umur pendidikan dan pekerjaan. Analisis bivariat digunakan untuk menganalisis hubungan variabel bebas dengan variabel terikat dengan uji statistik yang disesuaikan dengan tujuan penelitian dan skala data yang ada. Uji statistik yang digunakan ialah uji Chi Square dengan tingkat kemaknaan  $p < 0,05$ . Analisis multivariat digunakan untuk melihat pengaruh antar semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji statistik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji Regresi logistic. Uji regresi logistic dinilai dengan signifikansi  $p < 0,25$ . Hasil uji regresi logistic dinilai jika  $p < 0,25$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti ada pengaruh bersama antara variabel bebas dengan terikat, sedangkan jika  $p > 0,25$  maka  $H_0$  diterima yang berarti tidak ada pengaruh bersama antara variabel bebas dengan terikat. Penelitian ini menggunakan model regresi logistic, namun pada dua rancangan terakhir parameternya dicari melalui estimasi rasio odds (OR) yang merupakan perhitungan Eksponensial B ( $OR = e^{\beta}$ ) dari persamaan garis regresi logistic. Semakin besar nilai Eksponen B maka pengaruhnya semakin besar. [11], [12]

### 3. PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Karakteristik Responden

##### 1. Umur

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur

Umur (th)	<i>f</i>	%
Dewasa Awal (26 – 35)	26	26
Dewasa Akhir (36 - 45)	49	49
Lansia Awal (46 – 55)	17	17
Lansia Akhir (56 – 65)	8	8
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa dari 100 responden, 49 orang (49%) berumur dewasa akhir (36 – 45 tahun)

##### 2. Pendidikan

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	<i>f</i>	%
SD	52	52
SMP	23	23
SMA	19	19
Perguruan Tinggi	6	6
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui dari 100 responden, 52 orang (52%) berpendidikan terakhir Sekolah Dasar

##### 3. Pekerjaan

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	<i>f</i>	%
Petani	60	60
Swasta	26	26
Wiraswasta	14	14
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui dari 100 responden, 60 orang (60%) memiliki pekerjaan sebagai Petani.

#### B. Analisis Univariat

##### 1. Pengetahuan

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Responden Tentang Pengetahuan Terhadap BPJS Kesehatan

Pengetahuan	<i>f</i>	%
Kurang	19	19
Baik	81	81
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 4 diketahui dari 100 responden, 81 orang (81%) berpengetahuan baik.

## 2. Biaya

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Responden Tentang Biaya Terhadap BPJS Kesehatan

Biaya	<i>f</i>	%
Tidak Memberatkan	25	25
Memberatkan	75	75
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 5 diketahui dari 100 responden, 75 orang (75%) menganggap biaya BPJS Kesehatan memberatkan.

## 3. Prosedur Pendaftaran

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Responden Tentang Prosedur Pendaftaran Terhadap BPJS Kesehatan

Prosedur Pendaftaran	<i>f</i>	%
Sulit	22	22
Mudah	78	78
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 6 diketahui dari 100 responden, 78 orang (78%) menganggap prosedur pendaftaran BPJS Kesehatan tergolong mudah.

## 4. Minat

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Responden Tentang Minat Terhadap BPJS Kesehatan

Minat	<i>f</i>	%
Kurang	16	16
Berminat	84	84
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 7 diketahui dari 100 responden, 84 orang (84%) yang berminat.

## C. Analisis Bivariat

### 1. Pengaruh antara pengetahuan terhadap minat

Tabel 8. Pengaruh antara pengetahuan dengan minat

Pengetahuan	Minat				Total		p value
	Kurang		Berminat				
	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	
Kurang	10	52,6	9	47,4	19	100	0,000
Baik	6	7,4	75	92,6	81	100	

Berdasarkan tabel 8 diketahui dari 100 reponden terdapat sebagian besar 75 orang (92,6%) yang berminat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan yang memiliki pengetahuan baik, meskipun ada juga sebagian kecil 9 orang (47,4%) yang berminat tetapi pengetahuan yang dimilikinya kurang. Hasil uji statistik *chi-square* kedua variabel

ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara pengetahuan dengan minat masyarakat dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan ditunjukkan dengan nilai  $p = 0,000$  (dimana  $p < 0,05$ ).

Hasil serupa ditemukan pada penelitian Melinda, Anneke Suparwati, Antono Suryoputro (2016) berjudul Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Minat Masyarakat Dalam Keikutsertaan BPJS Mandiri Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, yang dalam penelitiannya menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan minat ( $p = 0,166$ ). [6]

Pengetahuan baik yang dimiliki masyarakat di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan kemungkinan disebabkan oleh banyaknya informasi mengenai BPJS Kesehatan yang sudah diperoleh masyarakat melalui sosialisasi, media massa baik cetak maupun elektronik dimana pengaruhnya menarik untuk diminati walaupun terkadang masyarakat kurang bisa memahami dengan baik informasi yang didapat tetapi berminat karena kemungkinan mendapatkan informasi dari cerita pengalaman positif orang yang sudah menggunakan BPJS Kesehatan.

Hal tersebut sesuai dengan teori Notoatmodjo (2012) bahwa pengetahuan merupakan domain penting dan faktor awal seseorang untuk menunjukkan minat. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun informal. Informasi yang didapat melalui pendidikan, pelatihan atau seminar akan meningkatkan pengetahuan seseorang dan selanjutnya akan menimbulkan kesadaran berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Pengetahuan dapat membentuk keyakinan tertentu sehingga seseorang dapat berperilaku sesuai keyakinan tersebut, termasuk perilaku minat dalam menjadi peserta BPJS Kesehatan dalam penelitian ini. Tanpa pengetahuan seseorang tidak mempunyai dasar untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi. [8]

## 2. Pengaruh antara biaya dengan minat

Tabel 9. Pengaruh antara biaya dengan minat

Biaya	Minat				Total		p value
	Kurang		Berminat				
	f	%	f	%	f	%	
Tidak Memberatkan	11	44	14	56	25	100	0,000
Memberatkan	5	6,7	70	93,3	75	100	

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa dari 100 responden terdapat sebagian besar 70 orang (93,3%) yang berminat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan yang menganggap biaya iuran BPJS Kesehatan dirasa memberatkan, meskipun ada juga sebagian kecil 14 orang (56%) yang berminat dan tidak merasa biaya iuran BPJS Kesehatan itu berat. Hasil uji statistik *chi-square* kedua variabel ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara biaya dengan minat masyarakat dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan ditunjukkan dengan nilai  $p = 0,000$  (dimana  $p < 0,05$ ).

Hasil serupa ditemukan pada penelitian Viona Febya Pangestika, Sutopo Patria Jati, Ayun Sriatmi (2017) berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepesertaan

sektor informal dalam BPJS kesehatan Mandiri di Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Dalam penelitiannya menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara pembiayaan dengan kepesertaan sektor informal dalam BPJS Kesehatan Mandiri ( $p = 0,000$ ). [9]

Masyarakat Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan yang beranggapan bahwa biaya BPJS Kesehatan memberatkan kemungkinan cenderung mempunyai pendapatan dalam keluarga yang tidak menentu, sehingga takut jika tiba jatuh tempo pembayaran iuran mereka tidak bisa membayar tepat waktu. Mereka beranggapan meskipun kelas kepesertaan BPJS Kesehatan yang akan dipilih adalah yang terendah kelas III tetap saja jika memiliki anggota keluarga yang cukup banyak maka biaya yang akan dibayarkan juga menjadi bertambah banyak. Hal itulah yang menyebabkan mereka sebenarnya berminat menjadi peserta BPJS Kesehatan tetapi berat dalam biaya iuran BPJS Kesehatan.

Hal tersebut sesuai dengan teori Fatah (2006) yang mengatakan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat desa akan menentukan tingkat partisipasinya dalam pembangunan, sehingga dapat disimpulkan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang tinggi maka partisipasinya tinggi, sedangkan masyarakat dengan tingkat kemampuan ekonomi yang rendah partisipasinya juga rendah. Oleh karena itu tidak ada kesenjangan antara teori dengan hasil temuan dilapangan. [4].

### 3. Pengaruh antara prosedur pendaftaran dengan minat

Tabel 10. Hubungan antara prosedur pendaftaran dengan minat

Prosedur pendaftaran	Minat				Total		p value
	Kurang		Berminat		f	%	
	f	%	f	%			
Sulit	7	31,8	15	68,2	22	100	0,000
Tidak Sulit	9	11,5	69	88,5	78	100	

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa dari 100 responden terdapat mengenai prosedur pendaftaran terdapat 69 orang (88,5%) yang berminat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan yang menganggap prosedur pendaftaran BPJS Kesehatan tidaklah sulit, meskipun ada sebagian kecil 15 orang (68,2%) yang berminat beranggapan bahwa prosedur pendaftaran sulit. Hasil uji statistik *chi-square* kedua variabel ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara prosedur pendaftaran dengan minat masyarakat dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan ditunjukkan dengan nilai  $p = 0,000$  (dimana  $p < 0,05$ ).

Hasil yang serupa dari penelitian sebelumnya mengenai pengaruh faktor prosedur pendaftaran dengan minat masyarakat dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan belum pernah ada sehingga tidak dapat dibandingkan dengan penelitian ini.

Prosedur pendaftaran yang dirasa mudah oleh masyarakat Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan dikarenakan syarat dan ketentuan pendaftaran BPJS Kesehatan hanya menggunakan KTP asli, fotokopi KK serta foto 3x4 serta nomor rekening bank (khusus kelas I dan II) yang memang sudah banyak dimiliki masyarakat pada umumnya. Masyarakat yang berminat tersebut masih banyak yang belum terdaftar sebagai peserta

BPJS Kesehatan, hal itu kemungkinan proses pendaftaran harus menuju ke kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Grobogan yang berada di wilayah Kecamatan Purwodadi dimana jarak yang ditempuh jauh, sehingga masyarakat merasa kerepotan untuk mengurus pendafrtan tersebut.

Hal tersebut seusai dengan teori bahwa prosedur pendaftaran BPJS Kesehatan merupakan langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam pendaftaran BPJS Kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana prosedur pendaftaran sebagai faktor pendukung minat masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam hal ini tidak ada kesenjangan pada teori maupun hasil temuan di lapangan.[1]

#### D. Analisis Multivariat

Tabel 11. Hasil analisis regresi multivariat dengan metode enter variabel bebas terhadap variabel terikat.

Variabel	Nilai p	OR (IK95%)
Biaya	0,000	9,282 (2,669 – 32, 285)
Pendaftaran	0,327	1,906 (0,524 – 6,927)

Berdasarkan hasil regresi multivariat pada tabel 11 menunjukkan bahwa secara bersama-sama faktor biaya dan pendaftaran yang berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan nilai Exp(B) pada hasil analisis di atas dapat dijelaskan bahwa variabel biaya berpengaruh terhadap minat masyarakat sebesar 9,282 kali lebih besar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan. Dalam hal ini faktor biaya merupakan pengaruh terbesar terhadap minat masyarakat dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan diantara variabel yang lain.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Hasil penelitian karakteristik dari 100 responden di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan 49% berumur dewasa akhir (36 – 45 tahun), 52% berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) dan 60% memiliki pekerjaan sebagai Petani. Sedangkan tingkat pengetahuan dari 100 responden 81% tergolong baik, 75% menganggap biaya memberatkan, 78% menganggap prosedur pendaftaran mudah, dan 70% cenderung berminat. Hasil uji statistik terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan, biaya, prosedur pendaftaran dengan minat masyarakat ( $p = 0,000$ ) dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan. Ada pengaruh secara bersama antara biaya dan prosedur pendafrtan terhadap minat, dengan faktor biaya yang paling dominan berpengaruh terhadap minat masyarakat sebesar 9,282 dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan.

Disarankan bagi Instansi BPJS Kesehatan perlu adanya penempatan kantor pelayanan pendaftaran maupun informasi terkait BPJS Kesehatan di daerah Kecamatan Gabus secara permanen sehingga mudah dijangkau serta perlu peningkatan cara pembayaran iuran BPJS Kesehatan melalui aplikasi di gadget kepada masyarakat dengan bekerja sama bersama pihak terkait supaya mudah dalam pembayaran sebagai Peserta BPJS Kesehatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. 2018. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penagihan, Pembayaran Dan Pencatatan Iuran Jaminan Kesehatan Dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Iuran Jaminan Kesehatan. Jakarta: BPJS Kesehatan.
- [2] Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kudus. 2018. Data Peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Grobogan Desember 2018. Kudus: BPJS Kesehatan Cabang Kudus.
- [3] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan. 2018. Data Agregat Kependudukan Kabupaten Grobogan Semester II Tahun 2018. Grobogan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Grobogan.
- [4] Fatah, Luthfi. 2006. Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Banjarbaru: Pustaka Banua.
- [5] Hidayat 2017. Metodologi Penelitian Keperawatan dan Kesehatan. Jakarta. Salemba Medika
- [6] Melinda. Suparwati, Anneke. Suryoputro, Antono. 2016. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Minat Masyarakat Dalam Keikutsertaan BPJS Mandiri di Kecamatan Bener. Semarang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro
- [7] Notoatmodjo, S. 2007. Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku. Jakarta : PT Rieneke Cipta
- [8] Notoatmodjo, S. 2012. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: PT Rineka Cipta
- [9] Pangestika, Viona Febya. Jati, Sutopo Patria. Sriatmi, Ayun. 2017. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepesertaan Sektor Informal Dalam BPJS Kesehatan Mandiri Di Kelurahan Poncol, Kecamatan PekalonganTimur Kota Pekalongan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- [10] Saraswati, B. 2013. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset
- [11] Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- [12] Sujarweni, V. Wiratna. 2014. Metode Penelitian: Lengkap, Praktis Dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press